

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui sistem pengendalian intern sebagai variabel *intervening*. Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang positif.
2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap sistem pengendalian intern yang positif.
3. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.
4. Terdapat pengaruh positif signifikan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel mediasi.

B. Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini banyak menemui hambatan serta masih terdapat kekurangan dalam penyelesaiannya. Beberapa keterbatasan yang diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah sebatas variabel kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian intern saja, sedangkan masih banyak variabel lain seperti sistem pelaporan kinerja, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, komitmen organisasi, dll .
2. Ruang lingkup penelitian yang terbatas yaitu hanya pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Madiun.

C. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat diberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti sistem pelaporan kinerja, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, komitmen organisasi, dll .
2. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat memperbanyak jumlah sampel yang akan digunakan, sehingga akan mendekati gambaran hasil yang lebih mendekati kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, Dina. 2015. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah". *Jom FEKON*, Vol. 2, No. 2, halaman: 1-15.
- Arifin, Beny. 2012. "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 13, No. 1, halaman: 15-27.
- Azmi, G., Darwanis, dan Abdullah, S. 2014. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumberdaya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Aceh". *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3, No. 4, Halaman:10-23. ISSN 2302-0164 pp
- Bangun, Andreas. 2009. "Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)". Tesis. Medan: Sekolah Pasca sarjana Universitas Sumatra Utara.
- Bpkad. 2017. <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/07/kejelasan-sasaran-anggaran/> diakses pada 7 juli 2019.
- Erawati, Teguh, dkk. 2018. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada SKPD Kota Yogyakarta)". *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*. Vol. 15, No. 2, halaman: 147-154.
- Fathia, Nurul. 2017. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Study Kasus SKPD di Provinsi Riau)". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, halaman: 670-685.
- Fitrawati, dkk. 2017. "Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Parigi Moutong)". *E Jurnal Katalogis*, Volume 5, Nomor 12, ISSN 2302-2019, halaman: 177-184.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Unversitas Diponegoro.

Helmi, Nopita. 2016. "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Umpan Balik Anggaran terhadap Kinerja Manajerial. (Skripsi tidak Dipublikasikan).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kaltsum, Ummu dan Rohman, Abdul. 2012. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel *Intervening* (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga). *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 1, Nomor 2, halaman: 1-14.

Kewo, Cecilia Lelly dan Afifah, Nunuy Nur. 2017. "Pengaruh Penganggaran Partisipasif, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Implementasi Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah Daerah serta Implikasinya pada Akuntabilitas Keuangan". *Proceedings*. ISSN 2252-3936, halaman: 527-539.

Khairunsyah dan Efni, Yulia. 2018. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Kompetensi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dimediasi oleh Komitmen Organisasi". *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, Vol. X, No. 01, halaman: 64-78.

Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2003. *Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Nugroho, L. S. 2016. "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektifitas Pengendalian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan)". Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Octarinda, Deby Ayu. 2016. "Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat". (Skripsi tidak Dipublikasikan).

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Pujiono, Dodik S, Sukarno, Hari, dan Puspitasari, Novi. 2016. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 10, No. 1, halaman: 68-81.

Rahman, Fajar Aditya. 2012. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Sensus pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya)". (*Skripsi tidak Dipublikasikan*).

Saputri, Elisya Anggraeni. 2018. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten)". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sari, Fita Andika. 2017. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan)". Skripsi. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo. (*Skripsi tidak Dipublikasikan*).

Si Manis. 2018. <https://www.pelajaran.id/2018/16/pengertian-fungsi-manfaat-jenis-dan-prosedur-penyusunan-anggaran.html> diakses pada 2 Januari 2019 pukul 21.30

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta

Syafrial. 2009. "Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Tesis. Program Studi Ilmu Akuntansi. Universitas Sumatera Utara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Zakiyudin, M. Ali dan Suyanto. 2015. “Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI”. *Jurnal Riset dan Perpajakan JRAP*, Vol. 2, No. 1, halaman: 89 - 96 ISSN 2339 – 1545.